

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH**

**20
23**

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tahun 2023. Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

Metode dan teknik penyusunan LAKIP ini berpedoman pada Peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan laporan kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan dan sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kinerja dan realisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, baik secara kinerjamaupun pelaporannya. Karenanya segala masukan kritik dan saran membangun tentulah menjadi bahan perbaikan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Polewali, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS,



H. AZWAR JASIN, S. Sos., M. Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19730711 199203 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|----|--|
| 1 | BAB I PENDAHULUAN |
| 2 | Latar Belakang |
| | KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI |
| 13 | BAB II PERENCANAAN KINERJA |
| 15 | A. RENCANA STRATEGIS |
| | B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023 |
| 17 | BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN |
| 42 | A. AKUNTABILITAS KINERJA |
| | B. AKUNTABILITAS KEUANGAN |
| 46 | BAB IV PENUTUP |
| | A. KESIMPULAN |
| | B. LANGKAH PERBAIKAN KEDEPAN |
| | LAMPIRAN |
| | -Perjanjian Kinerja Tahun 2023 |
| | -Pengukuran Kinerja Tahun 2023 |
| | -Realisasi Anggaran Tahun 2023 |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Latar Belakang Penyusunan Laporan

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan Misi Organisasi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas sekretariat daerah merupakan perwujudan kewajiban sekretariat daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi sekretariat daerah. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 perihal yang sama. Guna mendorong Good Governance dikalangan Instansi Pemerintah, maka Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai tindak lanjut atas aturan tersebut.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berintikan pada pemberian otonomi secara penuh kepada daerah dalam menyelenggarakan berbagai kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota telah diawali dengan penataan organisasi pemerintahan kabupaten dengan membentuk Badan, Dinas dan kantor.

2. Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab.Polewali Mandar sebagai Pelaporan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasasarn Program yang wajib dipenuhi, sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Sosial 2019-2024 dan dokumen penetapan kinerja

Tujuan :

- a. Memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kab.Polewali Mandar untuk meningkatkan kinerjanya.

3. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum Penyusunan Laporan AKIP ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- f. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- g. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015-2025
- i. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 tahun 2012 tentang Indikator kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
- j. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 43 Tahun 2012 tentang Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019.
- k. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 44 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- l. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 50 tahun 2017 tentang kedudukan, organisasi tugas pokok dan fungsi serta tata kerja dinas sosial Kabupaten Polewali Mandar.

B. Kedudukan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten dibidang sosial dan kesejahteraan sosial;
- b. Penyusunan rencana dan program dibidang sosial dan kesejahteraan sosial;

- c. Pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional dibidang sosial, dan kesejahteraan sosial;
- d. Pelayanan umum dibidang sosial dan kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Tugas pokok dan fungsi

| Tugas pokok dan fungsi | |
|------------------------|--|
| Jabatan | Kepala Dinas |
| Tugas Pokok | Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dinas. |
| Fungsi | <ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan rencana kerja di Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Tenaga Kerja dan Menetapkan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi perumusan di Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Tenaga Kerja dan b. Menetapkan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi koordinasi di Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Tenaga Kerja c. Menetapkan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan d. mengevaluasi pembinaan di Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Tenaga Kerja dan e. Menyelenggarakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas. f. Membuat laporan pelaksanaan fungsi dan tugasnya. g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan fungsi dan tugasnya. |
| | |
| Jabatan | Sekretaris |
| Tugas Pokok | merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas yang meliputi penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran, urusan ketatausahaan serta urusan keuangan dan perlengkapan |
| Fungsi | <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan program yang meliputi: penyusunan program dan anggaran; b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan yang meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat; c. Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan yang meliputi: urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut (laporan hasil pemeriksaan) dan perlengkapan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsi |
| Jabatan | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| Tugas Pokok | Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas yang meliputi : melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga dan protokol, surat-menyurat, kearsipan, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya |
| Fungsi | <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol serta surat menyurat; b. Pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi; |

| | |
|-------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> c. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan; d. Pelaksanaan urusan perlengkapan; e. Pelaksanaan urusan kepegawaian; f. Pengelolaan dan pelaksanaan urusan umum lainnya. |
| Jabatan | Sub bagian Keuangan Perencanaan dan Pelaporan |
| Tugas Pokok | Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas sekretariat, khususnya mengakomodir penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaporan dan khususnya dalam pengelolaan administrasi keuangan dan verifikasi terhadap penggunaan anggaran baik rutin maupun kegiatan. |
| Fungsi | <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran dengan bidang lain dalam lingkungan dinas; b. Pelaksanaan pelaporan anggaran baik anggaran rutin maupun kegiatan; c. Penyusunan laporan terhadap penggunaan anggaran baik rutin maupun kegiatan; d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang anggaran; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan perintah pembayaran anggaran; g. Penyusunan laporan hasil verifikasi terhadap penggunaan anggaran baik rutin maupun kegiatan; h. Pelaksanaan pembukuan dan urusan kas termasuk penyusunan neraca keuangan dinas; i. Pengelolaan administrasi keuangan lainnya; j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi |
| Jabatan | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Sosial |
| Tugas Pokok | Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya dibidang pemberdayaan sosial, dan penanganan Fakir Miskin. |
| Fungsi | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin; b. Penyusunan rencana dan program dibidang pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin; c. Pelaksanaan program dan pembinaan dibidang pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin; d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsi. |
| Jabatan | Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial, bantuan Stimulan dan Penanganan Fakir Miskin |
| Tugas Pokok | Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang pemberdayaan sosial, Bantuan Stimulan dan Penangan Fakir Miskin |
| Fungsi | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat, bantuan stimulan dan penanganan fakir miskin; b. Penyusunan Rencana Kerja teknis dan operasional pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat, bantuan stimulan dan Fakir Miskin; c. Pengendalian pelaksanaan bimbingan sosial pemberdayaan sosial dan pelayanan sosial bagi masyarakat di lingkungan kumuh; |

| | |
|-------------|--|
| | d. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan keluarga, KAT; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi |
| Jabatan | Kepala Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial |
| Tugas Pokok | Merencanakan kegiatan,member petunjuk, member tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial, khususnya dibidang kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. |
| Fungsi | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyimpan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; c. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.</p> |
| Jabatan | |
| Tugas Pokok | Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, khususnya dibidang bina kelembagaan sosial. |
| Fungsi | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang bina kelembagaan sosial; b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang bina kelembagaan sosial meliputi: karang taruna, bina kube dan lembaga sosial lainnya; c. Penyusunan laporan pelaksanaan program dibidang bina kelembagaan sosial meliputi: karang taruna, bina kube dan lembaga sosial lainnya; d. Pelaksanaan bimbingan teknis program dibidang bina kelembagaan sosial meliputi: karang taruna, bina kube dan lembaga sosial lainnya <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi</p> |
| Jabatan | a. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| Tugas Pokok | Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya dibidang perlindungan dan jaminan sosial. |
| Fungsi | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang perlindungan dan jaminan sosial; b. Penyelenggaraan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi bantuan, advokasi sosial dan bantuan hukum; c. Penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan jaminan sosial dalam bentuk asuransi/bantuan langsung berkelanjutan pada; fakir miskin, anak yatim piatu , terlantar, lansia dan penyandang cacat serta penderita penyakit kronis; d. Pelaksanaan program dan pembinaan dibidang perlindungan dan jaminan sosial ; e. Penyusunan laporan kegiatan dibidang perlindungan dan jaminan sosial; <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.</p> |
| Jabatan | e. Kepala Seksi Perlindungan Sosial |
| Tugas Pokok | Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas |

| | |
|-------------|--|
| | bidang perlindungan dan jaminan sosial, khususnya dibidang perlindungan sosial. |
| Fungsi | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang perlindungan sosial; b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang bantuan sosial bencana alam; c. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang bantuan sosial bencana alam; d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang bantuan sosial bencana alam; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi. |
| Jabatan | Kepala Seksi Jaminan Sosial |
| Tugas Pokok | f. Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas bidang bantuan dan jaminan sosial, khususnya dibidang jaminan kesejahteraan sosial. |
| Fungsi | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang jaminan kesejahteraan sosial; b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program dibidang jaminan kesejahteraan sosial; c. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang jaminan kesejahteraan sosial; d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang jaminan kesejahteraan sosial; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. |
| Jabatan | Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial |
| Tugas Pokok | Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya dibidang Rehabilitasi sosial. |
| Fungsi | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang Rehabilitasi Sosial; b. Penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan Rehabilitasi Sosial; c. Pelaksanaan program dan pembinaan dibidang Rehabilitasi sosial ; d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang Rehabilitasi sosial; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. |
| Jabatan | Kepala Seksi Lansia dan Anak |
| Tugas Pokok | Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas seksi Sosial, Lansia dan Anak. |
| Fungsi | <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan petunjuk teknis Rehabilitasi Sosial, Lansia dan Anak; b. Penyusunan Rencana Kerja Teknis dan Operasional pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Anak; c. Pengendalian data dan sistem informasi kesejahteraan sosial anak dan lansia; d. Pengendalian pelayanan rehabilitasi sosial anak balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak viabilitas dan berkebutuhan khusus; e. Pengendalian pelayanan Rehabilitasi Sosial pengangkatan Calon Orang Tua (COTA) dan Calon Anak Angkat (COA); f. Pengendalian Rehabilitasi sosial lansia, meliputi kelembagaan, perlindungan dan akseptabilitas dan pelayanan sosial di dalam dan diluar panti; g. Pengendalian dan koordinasi teknis rehabilitasi sosial anak |

| | |
|-------------|--|
| | dan lansia Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. |
| Jabatan | Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Disabilitas dan Panti |
| Tugas Pokok | Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas seksi Tuna Sosial, Disabilitas dan panti |
| Fungsi | <p>a. Penyusunan petunjuk teknis Rehabilitasi Tuna Sosial, Disabilitas dan panti;</p> <p>b. Penyusunan Rencana Kerja Teknis dan Operasional pelaksanaan Rehabilitasi Tuna Sosial, Disabilitas dan Panti;</p> <p>c. Pengendalian data dan sistem informasi kesejahteraan sosial Rehabilitasi Tuna Sosial, korban perdagangan orang;</p> <p>d. Pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial dan bekas warga binaan;</p> <p>e. Pengendalian pelayanan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza;</p> <p>f. Pengendalian Rehabilitasi sosial lansia, meliputi kelembagaan, perlindungan dan akseptabilitas dan pelayanan sosial di dalam dan diluar panti;</p> <p>g. Pengendalian dan koordinasi teknis rehabilitasi sosial anak dan lansia</p> <p>Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.</p> |

Sumber Daya SKPD

Pegawai pada Dinas Sosial Kab. Polewali Mandar terdiri dari:

Tabel 2. 1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon/Pejabat

| No. | Eselon | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|--------|--------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1. | II | 1 | - | 1 |
| 2. | III | 2 | 2 | 4 |
| 3. | IV | 5 | 2 | 7 |
| 4. | Staf | 5 | 4 | 9 |
| Jumlah | | 13 | 8 | 21 |

Tabel 2. 2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

| No. | Golongan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|--------|----------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1. | I | | - | 0 |
| 2. | II | 0 | 0 | 0 |
| 3. | III | 10 | 7 | 17 |
| 4. | IV | 3 | 1 | 4 |
| Jumlah | | 13 | 8 | 21 |

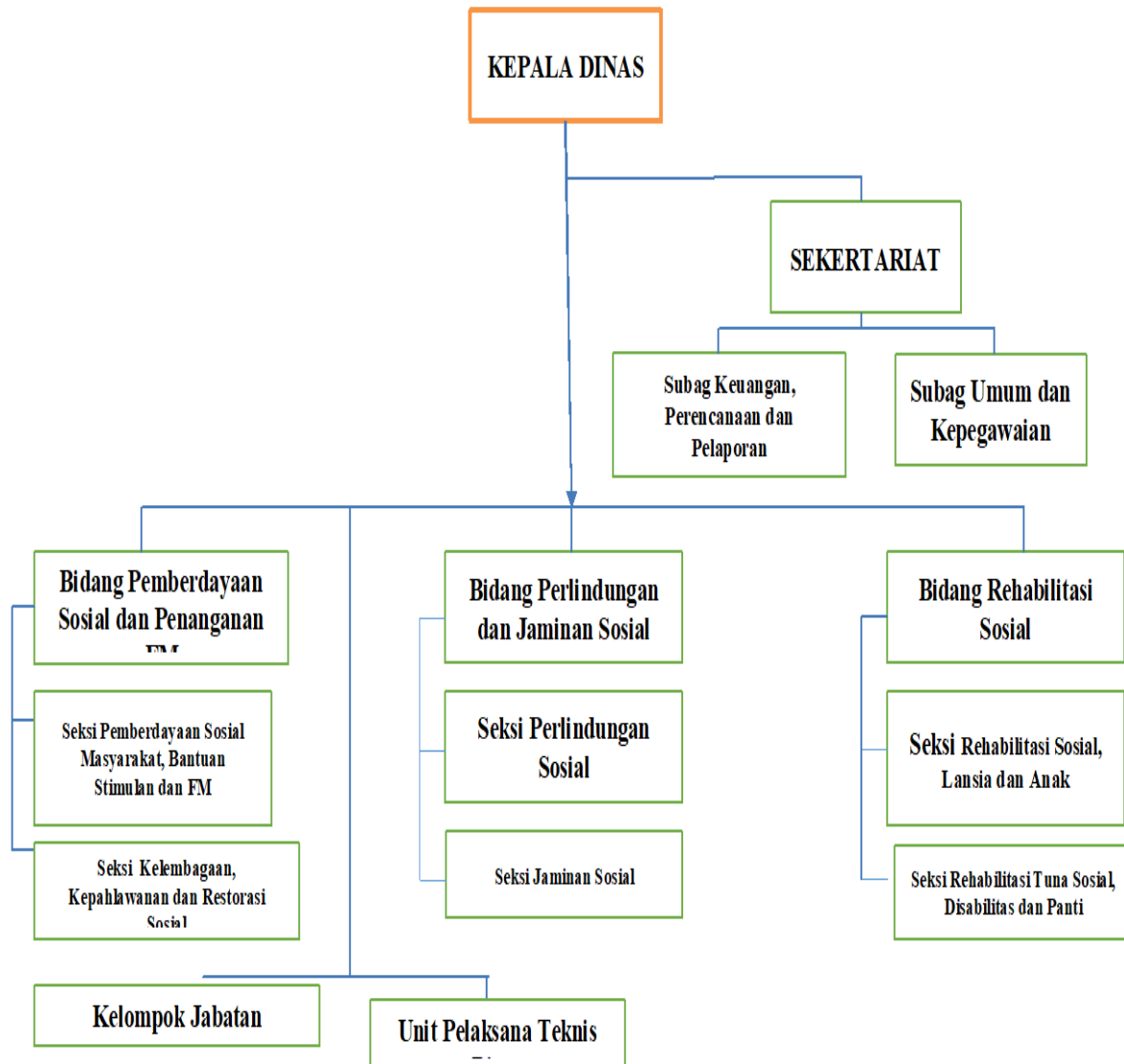
Tabel 2. 3 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

| No. | Pendidikan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|--------|---------------|---------------|-----------|--------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1. | SD | 0 | - | 0 |
| 2. | SLTP | - | - | |
| 3. | SLTA | 0 | 1 | 1 |
| 4. | Sarjana Muda | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Strata 1 (S1) | 7 | 6 | 13 |
| 6. | Strata 2 (S2) | 6 | 1 | 7 |
| Jumlah | | 13 | 12 | 21 |

Gambaran Umum SKPD

Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar No. 50 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar memiliki tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang sosial yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas perbantuan yang diberikan Pemerintah.

STRUKTUR DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR



Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang dilanjutkan dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 31 dan Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu Dinas Tekhnis yang cukup padat dengan tanggung jawab yang besar dimana didalamnya ada 3 (tiga) bidang yang harus dikoordinasikan dengan baik agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun setiap awal tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar merupakan pelaksana pemerintah kabupaten di bidang Sosial dimana Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Sosial yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah.

Oleh karena itu dalam Penyusunan LAKIP ini tentu diawali dengan proses penyusunan rencana strategi, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja. Adapun pedoman penyusunan LAKIP, mengacu pada Peraturan Menpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C.Isu-isu Strategis yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial adalah :

1. Kurangnya tingkat kemandirian para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana
3. Terbatasnya aparatur teknis bidang sosial
4. Peran SKPD lain kurang, terkait penanganan pemberdayaan kesejahteraan sosial
5. Belum adanya kerjasama penanganan masalah kesejahteraan sosial
6. Tidak memiliki sarana prasarana pelayanan sosial
7. Belum optimalnya potensi dari sumber dari kesejahteraan sosial
8. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar.

9. Masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum pernah tertangani.
10. Belum adanya tempat untuk menampung dan memberikan rehabilitasi hasil razia.
11. Masih kurangnya kesadaran dari penyandang masalah kesejahteraan tentang permasalahan yang dihadapi sehingga sering terjadi penolakan terhadap pelatihan yang diprogramkan oleh pemerintah untuk PMKS.
12. Masih kurangnya jumlah tenaga yang terdidik/terlatih dalam menangani masalah kesejahteraan sosial.
13. Belum adanya sarana barak penampungan hasil razia PMKS terutama untuk lansia terlantar dan gelandangan pengemis.
14. Terbatasnya tenaga terlatih di bidang kesejahteraan sosial yang terampil dalam menangani PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di lapangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019–2024 serta dijadikan acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar. Rencana strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, tahapan proses disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan setiap potensi maupun peluang yang ada serta hambatan yang mungkin akan timbul. Rencana strategis instansi pemerintah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, target, kebijakan, program serta pengukuran tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

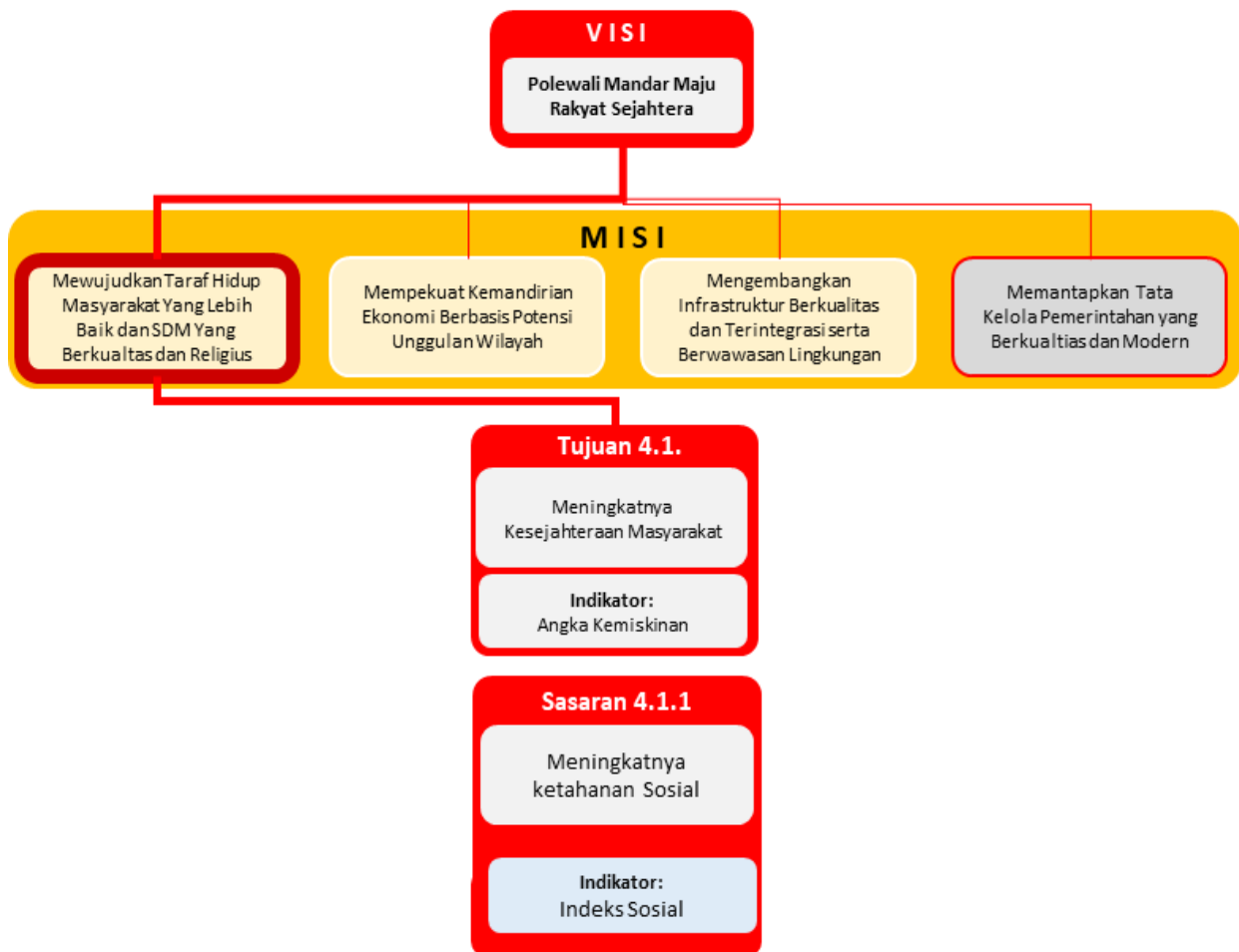
Dalam rangka menunjang pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024, dengan Visi Daerah *"Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera"*, yang akan dicapai melalui misi sebagai berikut :

Dimana visi tersebut dijabarkan menjadi 4 (empat) misi ;

1. Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang lebih baik dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan religius;
2. Memperkuat Kemandirian Ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah;
3. Mengembangkan Infrastruktur berkualitas yang terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
4. Memantapkan tata kelola Pemerintahan yang berkualitas dan modern.

Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar sebagai Leading Sector Pembangunan Kesejahteraan Sosial level Kabupaten masuk dalam misi 1 (satu) yaitu **"Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius"**.

**Tabel Kolerasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Dinas Sosial Kab.Polewali Mandar**



Keterkaitan Misi dan Tujuan

Sebagaimana visi dan Misi diatas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial mendukung pencapaian misi pertama **“Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius”**. selaras dengan Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar hingga tahun 2024 adalah Meningkatkan **Taraf Hidup Masyarakat** yang akan diukur melalui Indeks Gini Ratio Penduduk Miskin. Ditargetkan pada tahun 2024 Indeks Gini Ratio 0,321 tujuan tersebut tentu bisa dicapai dengan meningkatkan status kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan strategi

Untuk mencapai tujuan, Sasaran, Strategi sebagaimana tertuang dalam Renstra 2019-2024 maka yang menjadi sasaran adalah Penanganan

Masalah Kesejahteraan Sosial sedangkan sasaran strategi yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan adalah antara lain;

- a. Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Kelompok Masyarakat Rentan yang ter-Rehabilitasi;
- b. Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi PMKS Non Potensial dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Korban Bencana;
- c. Meningkatnya Kualitas Wahana Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Miskin Potensial yang diberdayakan.
- d. Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran;
- e. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja;
- f. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 adalah sebagai berikut;

- a. Target Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar periode 2023 berdasarkan capaian sasaran strategis ;

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Jumlah Indikator Kinerja Sasaran | TARGET 2023 |
|----|--|--|----------------------------------|-------------|
| 1 | Meningkatnya ketahanan sosial | Indeks Sosial | 1 | 49.27 |
| 2 | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 1 | Sangat Baik |
| 3 | Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial | Persentase PMKS yang memiliki ketahanan sosial | 1 | 38,00% |
| 4 | Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensi | Persentase masyarakat miskin potensi yang memiliki ketahanan sosial | 1 | 21,00% |
| 5 | Meningkatnya ketahanan sosial PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana | Persentase PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana yang memiliki ketahanan sosial | 1 | 82,00% |
| 6 | Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial | Persentase lembaga sosial yang aktif dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial | 1 | 100% |
| 7 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah | Predikat SAKIP perangkat daerah | 3 | A |
| | | Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah | | 100.00% |
| | | Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah | | Sangat Baik |

b. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar tahun 2023

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan. Hal ini penting karena memberikan arah hasil yang akan dituju. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Perjanjian Kinerja ini sekaligus merupakan Indikator Kinerja Kunci, Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2023 sebagai berikut :

| NO | TUJUAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET 2023 |
|----|--|----------------------------------|--|---|-------------|
| 1 | Meningkatnya ketahanan sosial | Indeks Sosial | Meningkatnya ketahanan sosial | Indeks Sosial | 49.27 |
| | | | Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial | Persentase PMKS yang memiliki ketahanan sosial | 38,00 % |
| | | | Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensi | Persentase masyarakat miskin potensi yang memiliki ketahanan sosial | 21,00% |
| | | | Meningkatnya ketahanan sosial PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana | Persentase masyarakat korban bencana yang memiliki ketahanan sosial | 100% |
| 2 | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sangat Baik |
| | | | Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial | Persentase lembaga sosial yang aktif dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial | 100% |
| | | | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah | Predikat SAKIP perangkat daerah | A |
| | | | | Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah | 100.00% |
| | | | | Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah | Sangat Baik |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar selaku pengemban amanah di bidang sosial melaksanakan kewajiban ber-akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2019-2024 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dan dari hasil Pengukuran Kinerja tahun 2023 Indikator kinerja sasaran sebagai alat ukur Pengukuran Keberhasilan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dapat dinyatakan Indikator sangat berhasil dan Berhasil yaitu pada indikator 5,6 dan 7 terkategori sangat baik.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2023 | REALISASI 2023 | KATEGORI |
|----|--|--|-------------|----------------|-------------|
| 1 | Meningkatnya ketahanan sosial | Indeks Sosial | 49.27% | 50,06 % | Baik |
| 2 | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |
| 3 | Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial | Persentase PMKS yang memiliki ketahanan sosial | 38,00% | 39.82% | Baik |
| 4 | Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensi | Persentase masyarakat miskin potensial yang memiliki ketahanan sosial | 21,00% | 20,08 % | Cukup Baik |
| 5 | Meningkatnya ketahanan sosial PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana | Persentase PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana yang memiliki ketahanan sosial | 82,00% | 90,3% | Sangat Baik |
| 6 | Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial | Persentase lembaga sosial yang aktif dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial | 100% | 100% | Sangat Baik |
| 7 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah | Predikat SAKIP perangkat daerah | A | A | Sangat Baik |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| | | Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah | 100.00% | 100.00% | Sangat Baik |
| | | Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik |

Keterangan : 0 sd 50 % = cukup baik, 50 s.d 100 % =Baik, > 100% Sangat Baik

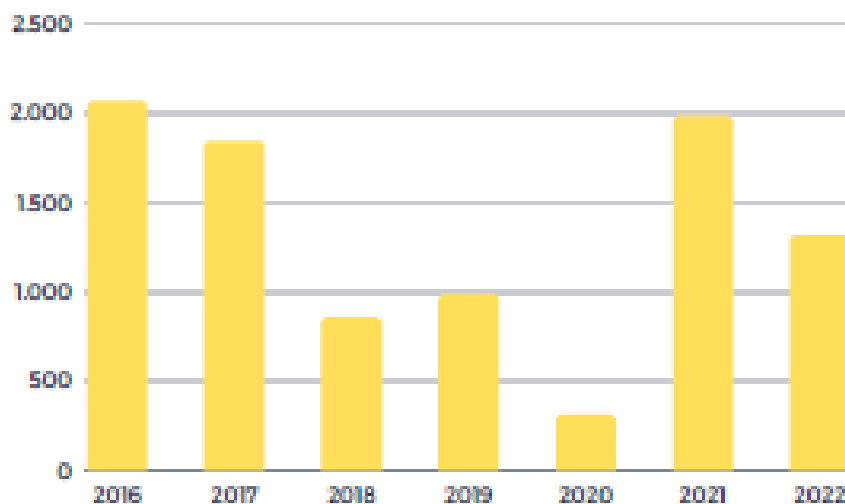
$$\text{indeks Ketahanan Sosial} = \frac{\text{persentase Capaian (Rehabilitasi Sosial + Pemberdayaan Sosial + Perlindungan dan Jaminan Sosial)}}{3} \times 100\%$$

$$= \frac{39.82 + 20.08 + 90.3}{3} \times 100\%$$

$$= 50,06\% \text{ (capaian tahun 2023)}$$

STATISTIK CAPAIAN PENANGANAN PPKS

2016 - 2022



STATISTIK 2016-2022

dari grafik capaian penanganan PPKS yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar cenderung fluktuatif. hal ini sangat dipengaruhi oleh alokasi besaran Pagu yang dikelola, termasuk di tahun 2020 (310) akibat refocusing anggaran dampak covid-19 dan tertinggi di tahun 2016 (2062) dan 2021 (1982)

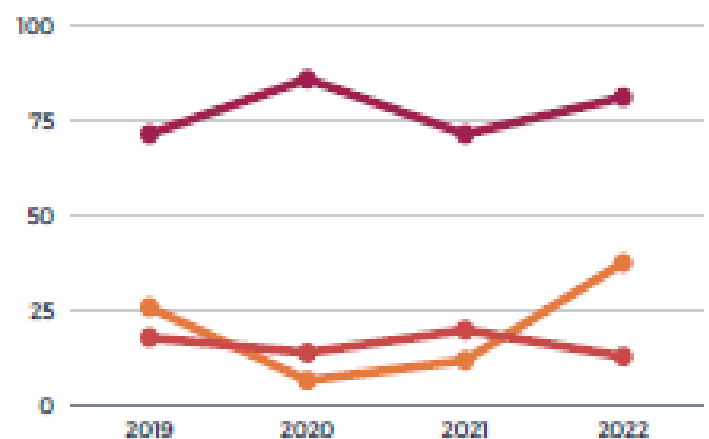
CAPAIAN 2019-2022

target capaian pada sasaran strategis tertinggi pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan terendah di Bidang Pemberdayaan Sosial

KESIMPULAN

Pagu Anggaran yang SANGAT TERBATAS adalah faktor yang paling berpengaruh dalam pencapaian setiap indikator Sasaran strategis, Kualitas SDM Pelaksana beserta kuantitasnya menjadi faktor pendukung pencapaian target prioritas di masa yang akan datang

Rehabilitasi Sosial
Pemberdayaan Sosial
Perlindungan dan jaminan Sosial



44,78

Target Capaian Indeks Sosial
tahun 2022

43,67

Realisasi Capaian Indeks Sosial
tahun 2022

TUJUAN 1

MENINGKATNYA KETAHANAN SOSIAL

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Target 2023 |
|----|---|--|-------------|
| 1. | Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial | Persentase PMKS yang memiliki ketahanan sosial | 38.00 |

Dinas Sosial, indikator sasaran merupakan komposit dari indikator Kinerja Program. Ditahun 2023 target output disetiap kegiatan telah dimaksimalkan pencapaiannya , program, kegiatan maupun sub kegiatan yang ada di Bidang rehabilitasi Sosial ini diharapkan mampu memperkuat peran Dinas Sosial khususnya dalam penanganan Kelompok Rentan Lansia dan Anak serta Disabilitas, hal ini merupakan amanat **SPM WAJIB** bidang Sosial . Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS yang seharusnya rangkaian sub kegiatan Penjangkauan, Advokasi lalu Pelayanan kemudian Tahap Rehabilitasi belum mampu dilaksanakan sepenuhnya. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan bagi PMKS hanya mampu diimplementasikan berupa layanan sosial bagi Anak dalam Panti berupa penyediaan bantuan permakanaan bagi Anak Terlantar. Panti yang mampu di beri layanan sosial dilakukan diluar Panti yang sebelumnya dilakukan bagi anak yg berada di dalam panti, hal ini akibat diberlakukannya/terbitnya permendagri Nomor 90 tahun 2019 dengan sasaran sejumlah 90 orang, yaitu jumlah jiwa yang ditangani dan memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 40 jiwa Lanjut Usia, 20 Anak dan 30 jiwa Disabilitas. Kelompok PMKS Disabilitas ini membutuhkan penanganan khusus dan lengkap agar yang bersangkutan dapat mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain.

mengingat pentingnya Program ini adalah salah satu penyumbang terbesar pencapaian SPM di Dinas Sosial, namun dalam perkembangannya Bidang ini belum maksimal dalam menyajikan Kegiatan-kegiatan yang langsung berhubungan dengan indikator Pencapaian SPM, Keterlantaran Kelompok Masyarakat Rentan yang mencakup Lanjut Usia Terlantar dan Anak Terlantar yang masih sangat minim dalam Penjangkauan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Salah satu solusi yang bisa ditempuh untuk memacu pencapaian pada sasaran strategis dimasa yang akan datang adalah;

HAMBATAN / TANTANGAN

1. Masih Kurangnya kapasitas / Kapabilitas pelaksana Rehabilitasi
2. Layanan Pusat Rehabilitasi di tingkat Kabupaten belum ada
3. Ketersediaan Petugas yang berkompeten (Ahli psikologi) sangat sulit dilakukan mengingat keterbatasan anggaran
4. Belum tersedianya data yang tervalidasi yang mencakup total jumlah PMKS yang seharusnya mendapatkan layanan dan Rehabilitasi Sosial

SOLUSI

1. Penyelarasan pandangan antar pelaksana / Penyedia Layanan dan Rehabilitasi Sosial tentang bagaimana Pelayanan Sosial dan Rehabilitasi Sosial yang layak seharusnya dilaksanakan;
2. Penyediaan Pusat Rehabilitasi Sosial di tingkat Kabupaten
3. yang diharapkan menjangkau Kelompok Rentan khususnya di pelayanan tingkat awal terhadap masalah sosial;
4. Peningkatan Pagu Anggaran.

ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

- a. Ketersediaan SDM seperti PKSAI (Pekerja Sosial Anak) sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja Program/Kegiatan. Sikap profesionalisme dan pengabdian tanpa pamrih mendampingi anak yang bermasalah dengan hukum sangat diapresiasi;
- b. Networking yang terbangun memudahkan penjangkauan bagi PMKS rentan, masyarakat yg mulai aktif serta peduli akan keadaan lingkungan sekitar sangat membantu penanganan kasus kasus yang menjadi perhatian masyarakat.

ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\% \\
 &= \frac{209.228.600}{209.328.400} \times 100\% \\
 &= 100\% - 0,95\% \\
 &= 99.5\%
 \end{aligned}$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di sasaran Strategis I ini sebesar 99.5%.

| No | Sasaran strategis OPD | Indikator Sasaran Renstra | Tahun | | Target | Realisasi |
|----|---|--|--------|---------|--------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Kelompok Masyarakat Rentan yang ter-Rehabilitasi | Persentase Penanganan Masalah sosial bagi Kelompok Masyarakat Rentan | 6.73 % | 37.08 % | 38.00% | 39.82% |

Persentase Penanganan Masalah Sosial bagi Kelompok Masyarakat Rentan tahun 2023 diperoleh dengan rumus sebagai berikut ;

Dan ditahun 2023 jumlah PMKS yang ditangani untuk mendapatkan hasil dari persentase tersebut adalah 90 orang, yaitu jumlah jiwa yang ditangani dan memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 40 jiwa Lanjut Usia, 20 Anak dan 30 jiwa Disabilitas.

Sasaran Strategis 1 (satu) yaitu **Meningkatnya Kuantitas Pelayanan Kelompok Masyarakat Rentan yang ter-Rehabilitasi** ini terdiri atas 1 (satu) Program pendukung yaitu Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Untuk meningkatkan capaian pada Sasaran Strategis ini Program ini adalah salah satu penyumbang terbesar pencapaian SPM di Dinas Sosial, namun dalam perkembangannya Bidang ini belum maksimal dalam menyajikan antaranya adalah Pelayanan dan Rehabilitasi bagi kelompok masyarakat rentan termasuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar serta Disabilitas.

$$\frac{\text{Jumlah Masyarakat Rentan ditangani yang diberi Pelayanan dan Rehabilitasi}}{\text{Jumlah Total Masyarakat Rentan yang seharusnya ditangani}} \times 100\%$$

$$\frac{90}{226} \times 100\%$$

$$= 39.8\%$$

| Capaian Output kegiatan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial | | | | | | | | |
|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kegiatan/Sub Kegiatan | Tahun | | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial (Jiwa) | | | | | | | | |
| Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat KP Napza lainnya bukan HIV/AIDS | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 55 | 25 | 30 |
| Penyediaan Makanan | 115 | 18 | 78 | 42 | 25 | 90 | 60 | 60 |

Tabel 3.2
Capaian Program / Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tahun 2023

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Output | Realisasi Output | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % |
|----|---------------------|---|---|---------------|------------------|---------------|--------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas | Penyediaan Permakanan | 60 orang | 60 orang | 155.867.600 | 155.767.800 | 99,94 |
| | | Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 30 orang | 30 orang | 53,460,800 | 53,460,200 | 100 |

Serba-serbi SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya ketahanan sosial penyandang
masalah kesejahteraan sosial

TARGET CAPAIAN 2022 : 33.00%

sesuai Permensos No.09 Tahun
2018 tentang **STANDAR
PELAYANAN MINIMUM (SPM)**
WAJIB BIDANG SOSIAL terdiri atas ;
85orang =20lansia + 10 anak + 15
kelompok rentan +BTT 9 lansia + 6
anak +25 disabilitas, di bagi 226
(371-145 capaian 2021)



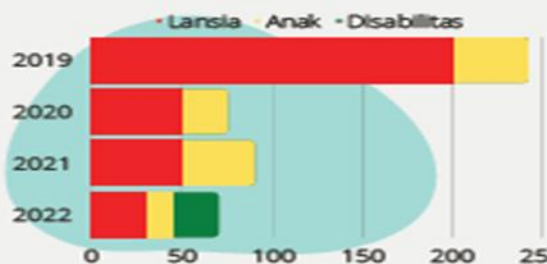
Data Perbandingan

adanya capaian yang signifikan
dari tahun sebelumnya yaitu di
2021 sebesar 12.00%

37%

37%

Perbandingan Capaian
sasaran dengan Total
PPKS Rentan kelompok
Lansia, Anak dan
Disabilitas



capaian kinerja output
kegiatan yang sangat
fluktuatif / sangat
tergantung pada alokasi
Pagu Anggaran yg tersedia

Dokumentasi



SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Target 2022 |
|----|--|--|-------------|
| 2. | Meningkatnya ketahanan sosial PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana | Persentase PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana yang memiliki ketahanan sosial | 82% |

| No | Sasaran strategis OPD | Indikator Sasaran Renstra | Tahun | | Target | Realisasi |
|----|--|--|--------|------|--------|-----------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 2 | Meningkatnya ketahanan sosial PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana | Persentase PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana yang memiliki ketahanan sosial | 85.86% | 71% | 82% | 90,3% |

Tabel Capaian Sasaran strategis 2 tahun 2020-2023

| Capaian Output kegiatan bidang PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | |
|---|---|------------|-----------|--|---|
| Kegiatan/Sub Kegiatan | | | | | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | | | | |
| Penanggulangan Tanggap Darurat Korban Bencana | Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota sub kegiatan : Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota | 174 jiwa | 514 jiwa | 150 Paket | 150 Paket |
| Verifikasi DTKS | | 32.000 KM | 87.814 KM | 71.048 KM (150 KK bantuan logistik bencana + 228 RTLH + 71.025 KK data penerima bansos yang di verifikasi) | 85.159 KM (19.645 KK bantuan beras + 76.340 KK data penerima bansos yang di verifikasi) |
| Pemantauan Pelaksanaan Program PKH | | 20.099 KPM | | | |
| Pemantauan Pelaksanaan BPNT | | 36.079 KPM | | | |
| BantuanJaminan Permakanan (kebutuhan dasar) bagi Lansia terlanter dan kelompok rentan lainnya | | 0 | | | |

Persentase Masyarakat miskin yang masuk dalam cakupan Penjaminan Sosial serta Jumlah Korban Bencana Alam/Sosial yang mendapatkan bantuan Logistik masuk dalam indikator ini dan bila dilihat dari tahun ke tahun 2020 s.d 2023 jumlahnya mengalami kenaikan, mengingat keluarga yang diberikan bantuan juga bertambah jumlahnya sehingga realisasi kinerja tercapai sebesar 90,3%.

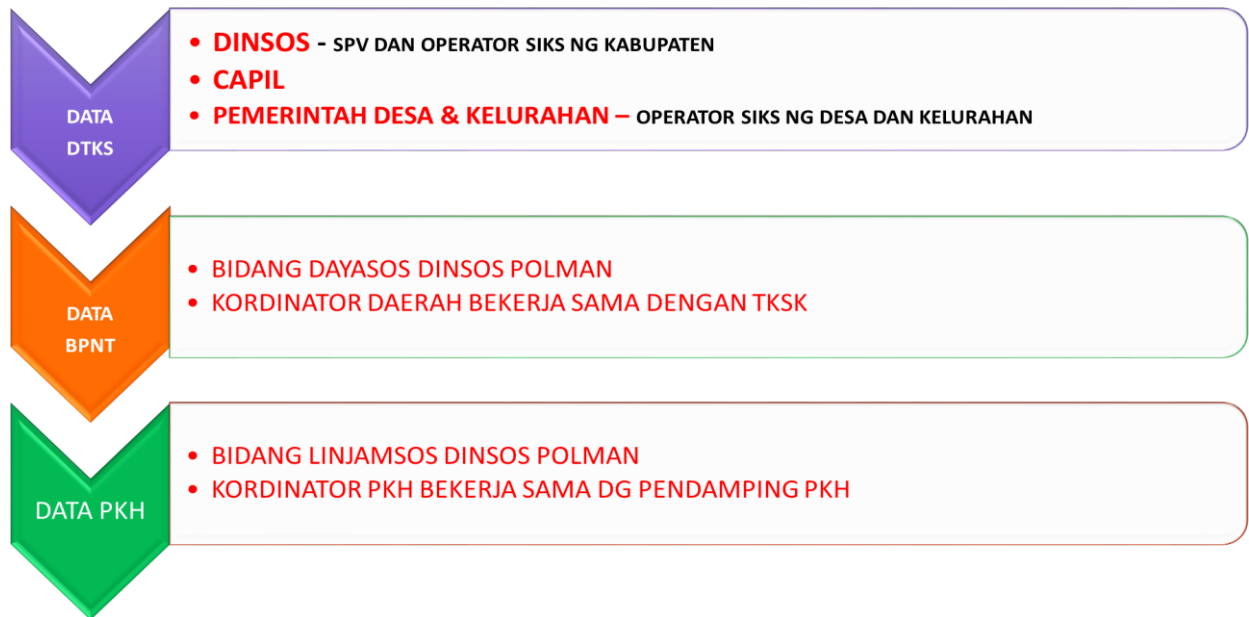
$$\frac{\text{Jumlah Warga Miskin yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial}}{\text{Jumlah Total Warga Miskin yang seharusnya menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial}} \times 100\%$$

$$\frac{85.309}{94.405} \times 100\% = 90,3 \%$$

Dinas Sosial khususnya yang berada dibawah koordinasi seksi Perlindungan Sosial. Pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Updating Basis Data Terpadu (BDT) melalui aplikasi SIKS-NG yang menysasar 40% Masyarakat dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah diharapkan mampu menyaring Data Layak dan Tidak Layak atau lebih familiar dengan istilah Inclusion dan Exclusion Error, aplikasi ini berupa menu isian pemutakhiran yang mencakup data keluarga Miskin, Data Anggota Keluarga, Pekerjaan serta data yang bersifat pribadi lainnya. Plus berisi jenis Program Bantuan yang diterima.

Pengelolaan system Jaminan Sosial juga tercakup di sub kegiatan Pengelolaan data kemiskinan tingkat Kabupaten/Kota, seiring dengan indikator Persentase Masyarakat Miskin Penerima Penjaminan Sosial. Dan ditahun 2023 target capaian yang ditetapkan adalah 82.00% seiring dengan dilaksanakannya verifikasi data kependudukan melalui basis data Nomor Induk kependudukan (NIK) bagi masyarakat yang masuk dalam Data Tingkat Kesejahteraan Sosial (DTKS) .

| KABUPATEN/KOTA | USER DITETUJAI | USER DITOLAK | USER MENINGGU APPROVAL | USULAN DITETUJAI | USULAN DITOLAK | USULAN BELUM DIPROSES | SANGGAHAN DITETUJAI | SANGGAHAN DITOLAK | SANGGAHAN BELUM DIPROSES |
|----------------------|----------------|--------------|------------------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| KAB. MAJENE | 991 | 186 | 0 | 274 | 1 | 67 | 19 | 0 | 13 |
| KAB. MAMASA | 1.233 | 293 | 1 | 188 | 129 | 51 | 19 | 1 | 8 |
| KAB. MAMUJU | 1.942 | 355 | 7 | 239 | 384 | 11 | 10 | 8 | 14 |
| KAB. MAMUJU TENGAH | 840 | 142 | 0 | 95 | 2 | 22 | 1 | 0 | 4 |
| KAB. PASANGKAYU | 582 | 103 | 0 | 105 | 2 | 9 | 11 | 0 | 9 |
| KAB. POLEWALI MANDAR | 2.122 | 422 | 1 | 673 | 32 | 178 | 31 | 1 | 18 |



Program PKH dan BPNT adalah merupakan Program andalan Pemerintah yang diharapkan mampu menahan laju pertumbuhan angka kemiskinan dan merupakan Program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial, dimasa Pandemi dimana Pemerintah pusat menyalurkan berbagai mode Paket Bantuan yang diharapkan mampu meringankan beban masyarakat terdampak pandemic Program ini menyasar Penduduk Miskin yang Datanya terangkum dalam Basis Data Terpadu (BDT) 25.021 KPM merupakan penerima PKH dan sekitar 40.493 KM adalah penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial dari Program ini diambil dari APBN sedangkan operasionalnya didapat dari sharing Dana APBD Kabupaten Polewali Mandar. Kendala pelaksanaan kegiatan ini biasanya bersifat teknis operasional yang sangat berpengaruh pada pemutakhiran besaran bantuan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Ditahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar di amanahkan untuk melaksanakan pemberian bantuan beras melalui APBD perubahan. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Bantuan beras ini menyasar masyarakat miskin ekstrim yang juga berada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai rujukan, hal ini dilakukan sebagai bentuk guarantee akan tepat sasaran, layak atau tidaknya masyarakat sasaran mendapatkan bantuan sosial beras ini, berdasar pada verifikasi dan validasi kelayakan sejumlah 19.645 Rumah Tangga dinyatakan layak untuk menerima bantuan beras ini.

Adapun prasyarat yg dimaksud terangkum sebagai berikut;

- merupakan warga Kabupaten Polewali Mandar sesuai identitas kependudukan
- Masyarakat berpenghasilan rendah dan masuk pada basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS);
- Masuk dalam kategori miskin ekstrim berdasarkan data kementerian terkait.

Berikut adalah tabel capaian persentase untuk Sasaran strategis kedua;

Tabel 3.3

Capaian Program / Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2023

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Output | Realisasi Output | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % |
|----|---------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Perlindungan dan Jaminan Sosial | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota | 74.740 KM | 87.814 KM | Rp. 607.519.000 | Rp. 580.626.500 | 95,57 |
| 2. | Perlindungan dan Jaminan Sosial | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 18.966 keluarga | 19.645 KK | Rp.5.632.013.800 | Rp.5.631.519.400 | 99,99 |
| 3. | Penanganan Bencana | Perlindungan Sosial Korban Bencana | Penyediaan Makanan | 150 Paket (bantuan logistic bencana) | 150 Paket | Rp. 183.329.450 | Rp. 183.204.305 | 99,96 |

Kegiatan Penanggulangan Bencana berupa Penyaluran Logistik bagi Korban Bencana baik Bencana Alam maupun Bencana Sosial, kesiapsiagaan dalam rangka Tanggap Darurat adalah hal mutlak, Dengan pengaktifan satuan siaga bencana (TAGANA) adalah salah satu upayanya. Dengan adanya TAGANA diharapkan resiko dan korban akibat bencana dapat diminimalisir, terkait kegiatan ini Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar juga berkoordinasi aktif dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat. Pendataan dan penyalurannya dilaksanakan langsung oleh personil TAGANA dan personil Pekerja Sosial lainnya .

HAMBATAN / TANTANGAN

1. Masih Tingginya angka jumlah Masyarakat Miskin yang belum tercover Penjaminan Kesehatan
2. Belum tersedianya Data Valid Jumlah PMKS yang layak mendapatkan penjaminan Sosial
3. Masih adanya Tumpang Tindih perihal kewenangan Pengelolaan Logistik Bencana
4. Filtering Data Penerima Bantuan Sosial seperti Rastra dan PKH masih belum maksimal sehingga Data ganda masih didapati
5. Jumlah Eksclusion dan Inclusion Error Penerima PKH masih tinggi

SOLUSI

1. Disarankan untuk melaksanakan koordinasi yg lebih intens kepada pihak Pemerintah Desa agar Validitas data yg akan menjadi dasar pengelolaan data di tingkat desa bisa lebih berkualitas.
2. Percepatan Verifikasi Validasi Data Kesejahteraan Sosial melalui Aplikasi SIKS-NG perlu segera dilaksanakan
3. Maksimalisasi pelaksanaan Graduasi Mandiri kepesertaan PKH
4. Konsolidasi periodik bagi seluruh pendamping lapangan yang menangani Penyaluran Bantuan Sosial mutlak diperlukan

ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

1. Indikator pada level impact dan Outcome pada Sasaran Strategis ini umumnya bersifat Fisik (besaran Bantuan kepada masyarakat) serta populasi Data dan Penyaluran Logistik, sementara kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome kadang sulit tercapai. Sebagai solusi alternatif bentuk koordinasi dan pembinaan kepada multipihak yang terkait dalam upaya Penjaminan Sosial akan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya .
2. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif direncanakan pada tahun 2023 akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.

ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\begin{aligned}\text{Persentase efisiensi} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\% \\ 100\% - &= \frac{6.395.350.205}{6.422.862.250} \times 100\% \\ &= 100\% - 0.43\% \\ &= 99.57\%\end{aligned}$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di sasaran Strategis II ini sebesar 99.57%.

SERBA SERBI

SASARAN STRATEGIS 2
Meningkatnya ketahanan sosial
masyarakat miskin potensial

"TARGET 2022"



"REALISASI 2022"



"71048 = 70520 + 684 JIWA
RTLH = 71204/ DATA

KELUARGA MISKIN DIBAGI
87.814 DATA KKM YG TELAH
DIVERIFIKASI DI TAHUN
2021

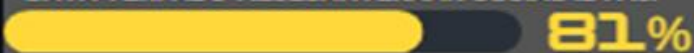
JUMLAH RTLH 228 UNIT

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI



DATA PENERIMA BANSOS YG
DIVERIFIKASI

PENERIMA PKH
BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)



SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Target 2023 |
|----|---|---|-------------|
| 3. | Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial | Persentase masyarakat miskin potensial yang memiliki ketahanan sosial | 21.00 |

Tabel Capaian Sasaran startegis 3 tahun 2020-2023

| No | Sasaran strategis OPD | Indikator Sasaran Renstra | Tahun | | | Target | Realisasi |
|----|---|--|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 3 | Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial | Persentase Rata-rata Masyarakat Miskin Mandiri Persentase Lembaga Sosial pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial | 18.79% | 14.28% | 13.00% | 21.00% | 20.08% |

$$\begin{array}{l}
 \frac{\text{Jumlah Warga Miskin Potensial yg difasilitasi}}{\text{Jumlah Total Warga Miskin yang Potensial seharusnya ditangani}} \times 100\% \\
 = \frac{1187}{5910} \times 100\% \\
 = 20.08\%
 \end{array}$$

Tabel 3.4
Capaian Program / Bidang Pemberdayaan FM dan Kelembagaan Sosial Tahun 2023

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Realisasi Output | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % |
|----|---------------------|---|--|------------------------------|----------------|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Pemberdayaan Sosial | Pemberdayaan Sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) | Pemberdayaan Sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) | 687 jiwa KAT + 491 Jiwa KUBE | Rp.710.298.000 | Rp.710.298.000 | 100.00 |
| 2 | | | Peningkatan kemampuan potensi sumber Peksos Masy kewenangan kab/kota | 15 orang Peksos yg dilatih | Rp.15.045.600 | Rp.15.045.600 | 100.00 |

Program Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin adalah Program yang menyasar PMKS terkategori Produktif / masih bisa diberdayakan yang mengalami ketidak berdayaan akibat terganggunya fungsi sosial baik oleh lingkungan, keterpencilan wilayah maupun karena yang bersangkutan memang tidak memiliki fasilitas yang mampu mendukung yang bersangkutan untuk bisa menjadi produktif. Contohnya masyarakat terpencil yang akibat wilayahnya jauh dari pusat pemerintahan maupun pusat ekonomi sehingga mengakibatkan kelompok masyarakat ini termarginalkan, meskipun pada dasarnya mereka memiliki potensi yang besar jika difasilitasi. Kegiatan Pemberdayaan bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Polewali Mandar berada di Desa lenggo Kecamatan Bulo 54 jiwa, Ditahun 2023 ditargetkan semua jiwa dalam komunitas tersebut memperoleh bantuan kegiatan pemberdayaan. Sedangkan bagi Keluarga Miskin Potensial serta Lansia Potensial yang diberdayakan dengan kegiatan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan penyediaan ditahun 2023 kegiatan ini diharapkan mampu dijalankan dengan metode Bantuan Stimulan sehingga keberlanjutan kegiatan Pemberdayaan tersebut dapat betul betul efektif.

Capaian Sasaran strategis Program Pemberdayaan Sosial ditahun 2023 mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya (tahun 2021). Ditahun 2021 capaian mencapai 14.28% 20.00% yang ditargetkan, sedangkan ditahun 2022 naik ke angka 13.00% dan di tahun 2023 menjadi rendahnya capaian disebabkan. faktor yang juga mempengaruhi adalah bahwa kegiatan di Program ini tidak cukup mendukung pencapaian SPM dinas Sosial (tidak masuk dalam indikator) capaian SPM. Langkah-langkah yang dianggap perlu untuk segera dilaksanakan agar capaian di sasaran ini semakin meningkat adalah antara lain;

HAMBATAN / TANTANGAN

1. Masih Rendahnya kesadaran Masyarakat Miskin tentang pentingnya Bantuan Stimulan digulirkan secara terus menerus
2. Belum jelasnya Regulasi Pengalihan kewenangan Penerbitan Rekomendasi BPJS dimasa yang akan datang
3. Jumlah Keluarga Miskin yang layak memperoleh Bantuan Stimulan masih sangat tinggi dan terkonsentrasi di wilayah Pesisir
4. Akses ke lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) masih sangat minim baik itu akses Jalan maupaun Akses Telekomunikasi
5. Pembinaan berkelanjutan belum dilaksanakan khususnya bagi Keluarga Miskin yang telah menerima bantuan stimulan

SOLUSI

1. Pembinaan berupa Pendampingan kepada Masyarakat / Keluarga Miskin perihal pentingnya kemandirian secara ekonomi lebih di intensifkan
2. Penyaluran Bantuan di wilayah pesisir tempat terkonsentrasinya kantong-kantong kemiskinan untuk lebih diintensifkan
3. Regenerasi Pekerja Sosial khususnya TKSK segera dilakukan mengingat perkembangan masalah sosial di lapangan yang semakin beragam
4. Validasi Data PMKS khususnya bagi PMKS Potensial mutlak segera dilakukan agar tidak ada lagi salah sasaran penerima bantuan sosial

ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Indikator Outcome pada Program Pemberdayaan Sosial umumnya bersifat bantuan stimulant / bantuan Pemberdayaan, sementara kegiatan yang dilaksanakan terbatas sebagian besar berupa kunjungan serta monev pelaksanaan pengawasan khususnya bantuan yg dilaksanakan ditahun sebelumnya, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome kadang sulit tercapai. Sementara list proposal calon penerima bantuan semakin bertambah sehingga solusi alternative yg dinilai mampu menyelesaikan persoalan ini adalah pengajuan proposal ke kementerian sosial melalui dana Dekonsentrasi yg melekat di Provinsi atau melekat di Program Nasional seperti PKH.

ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Persentase efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$100\% = \frac{725.343.600}{725.343.600} \times 100\% = 100\%$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di sasaran Strategis III ini sebesar 100%.

SERBA SERBI

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial

sasaran strategis 3 ini menyasar kelompok PPKS Potensial seperti Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT), Keluarga Miskin Potensial yang memiliki usaha serta peningkatan kapasitas bagi PSKS khususnya Pekerja Sosial yg terlibat langsung dalam usaha Kesejahteraan Sosial



TARGET 2022



REALISASI 2022



Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial

Tabel Capaian Sasaran strategis 4 tahun 2020-2023

$$= \frac{\text{Jumlah Lembaga/Wahana
Kesos yang dibina}}{\text{Jumlah Total Jenis Lembaga
Sosial yang seharusnya
dibina dalam 1 tahun}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{2} \times 100\%$$



Tabel 3.5

Capaian Program / Bidang Pemberdayaan FM dan Kelembagaan Sosial Tahun 2023

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Realisasi Output | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % |
|----|--|--|--|------------------|---------------|--------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kewenangan Kab/Kota | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kewenangan Kab/Kota | 2 lokasi | 36.334.100 | 36.334.100 | 100 |

HAMBATAN / TANTANGAN

1. Luas nya areal yang harus dijaga kondisinya pad setiap pelaksanaan upacara/peringatan hari besar;
2. Kurangnya kepedulian masyarakat sekitar serta kepedulian pemerinth setempat dalam menjaga situs/tempat bersejarah yg berada di wilayahnya
3. Intervensi pihak provinsi dan Pusat yg dinilai belum cukup berperan serta dalam membantu pelestarian situs/ tempat bersejarah

SOLUSI

Adanya sinergi antar stakeholder masyarakat dan Pemerintah dalam ikut menjaga kelestarian situs/tempat bersejarah, pengenalam kepada generasi muda tentang arti penting semangat keperintisan dan kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial yang menjadi modal dasar keberlangsungan semangat nilai nilai nasionalisme yang seharusnya tertanam sedari dini

ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Indikator Outcome pada Program Pemberdayaaan Sosial umumnya bersifat bantuan stimulant / bantuan Pemberdayaan, sementara kegiatan yang dilaksanakan terbatas sebagian besar berupa kunjungan serta monev pelaksanaan pengawasan khususnya bantuan yg dilaksanakan ditahun sebelumnya, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome kadang sulit tercapai. Sementara list proposal calon penerima bantuan semakin bertambah sehingga solusi alternative yg dinilai mampu menyelesaikan persoalan ini adalah pengajuan proposal ke kementerian sosial melalui dana Dekonsentrasi yg melekat di Provinsi atau melekat di Program Nasional seperti PKH.

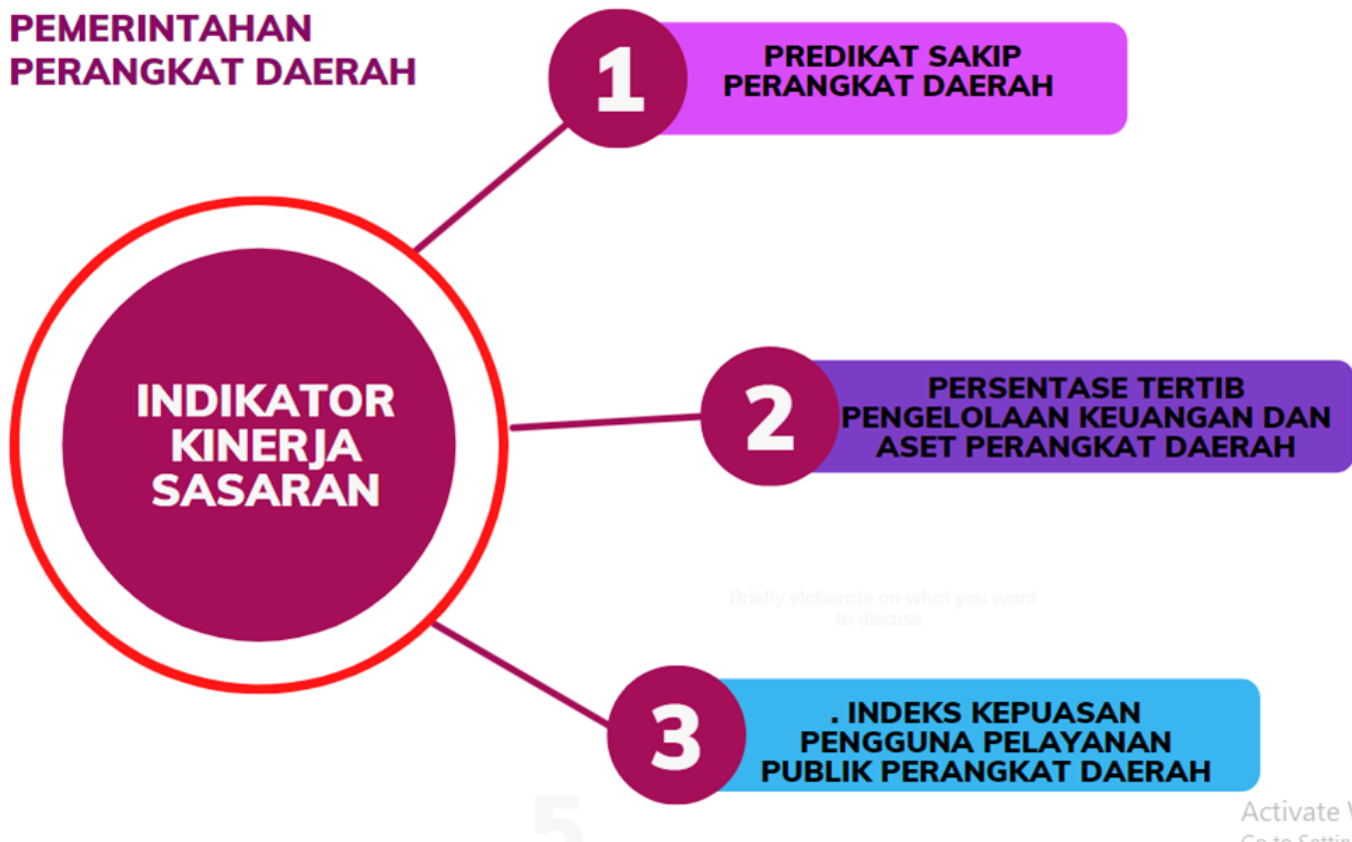
ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Persentase efsiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 100\% - &= \frac{36.334.100}{36.334.100} \times 100\% \\ &= 100\% - 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di sasaran Strategis IV ini sebesar 0.00% secara teory masih sangat efektif dalam hal efisiensi.

**MENINGKATNYA
KUALITAS TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
PERANGKAT DAERAH**



SASARAN STRATEGIS 5 Indikator 1

Predikat SAKIP perangkat daerah

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Target 2023 | Realisasi 2023 |
|----|---|---|-------------|----------------|
| 5. | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah | 1. Predikat SAKIP Perangkat Daerah | A | |
| | | 2. Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah | 95,56% | 100% |
| | | 3. Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah | Sangat Baik | Sangat Baik |

Adapun Realisasi untuk ke 3 (tiga) Program diatas mencapai 98.88 % (termasuk gaji) angka ini menunjukkan tingkat penyerapan anggaran untuk Program ini sangat maksimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 09 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Di tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar mendapat predikat BB dari Inspektorat daerah Kabupaten Polewali Mandar , Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

| | KomponenYang Dinilai | 2021 | | 2020 | |
|----|--------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | Bobot | Nilai | Bobot | Nilai |
| a. | Perencanaan Kinerja | 30 | 29.10 | 30 | 29,10 |
| b. | Pengukuran Kinerja | 25 | 20.94 | 25 | 20.94 |
| c. | Pelaporan Kinerja | 15 | 9.27 | 15 | 9,00 |
| d. | Evaluasi Internal | 10 | 4.49 | 10 | 4,12 |
| e. | Capaian Kinerja | 20 | 12.00 | 20 | 12,00 |
| | Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 75.80 | 100 | 75,16 |
| | Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | BB | | B |

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun **2022**, merupakan salah satu dokumen yang di evaluasi selain Rencana Strategis (Renstra) dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar memperoleh nilai **75,80** atau memperoleh predikat rating **"BB"**. Rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut,

Tabel 3.7

Program/Kegiatan yang mendukung **Predikat SAKIP Perangkat Daerah**

| NO | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | REALISASI | | % Rp. | SISA |
|----|---|--|--------|-----|-----------|-----|-------|------|
| | | | K | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Predikat SAKIP perangkat daerah; opini PKPD; IKM | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------|---|------------|--------|---|
| A | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dok. Perencanaan perangkat daerah yg disusun sesuai standar dan tepat wkt | 4 | 16,230,700 | 4 | 16,230,700 | 100.00 | - |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dok. Kinerja yg dihasilkan | 1 | 1,470,000 | 1 | 1,470,000 | 100.00 | - |

HAMBATAN / TANTANGAN

1. Masih Rendahnya kesadaran internal lingkungan Dinas Sosial tentang arti pentingnya penerapan akuntabilitas kinerja pada setiap kerja kerja yang dilaksanakan
2. Kurangnya sosialisasi tentang penerapan akuntabilitas kinerja serta komponen penilaian yang melekat didalamnya

SOLUSI

Peningkatan sosialisasi/pemahaman kepada seluruh ASN lingkup Dinas Sosial tentang arti penting Peningkatan kapasitas kerja serta kualitas kinerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari serta memberikan motivasi kerja melalui punishment and reward kepada setiap ASN yg berkinerja baik.

ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Persentase efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 100\% - &= \frac{1,470,000}{1,470,000} \times 100\% \\ &= 100\% - 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di indikator 1 ini sebesar 0% secara teory sangat efisien.

Indikator 2

Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah

Tabel 3.8

Program/Kegiatan yang mendukung **Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah**

| NO | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | REALISASI | | % Rp. | SISA |
|--------|---|--|--------|---------------|-----------|---------------|--------|------------|
| | | | K | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Predikat SAKIP perangkat daerah; opini PKPD; IKM | | | | | | |
| A | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase PNS perangkat daerah yg berkinerja baik | 100 | 1,592,899,227 | 100 | 1,577,167,659 | 99,01 | 15,731,568 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah PNS | 21 | 1,590,659,227 | 100 | 1,574,927,659 | 99,01 | 15,731,568 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jmh Dok. LK akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu | 1 | 2,240,000 | 1 | 2,240,000 | 100.00 | |
| JUMLAH | | | | 1,592,899,227 | | 1,577,167,659 | 91.35 | 15,731,568 |

HAMBATAN / TANTANGAN

1. Masih rendahnya pengetahuan keilmuan tentang akuntabilitas keuangan yang benar
2. Penerapan Akuntabilitas Keuangan di setiap kegiatan yang dilaksanakan masih bersifat umum / belum menyeluruh

SOLUSI

Upaya Peningkatan kapasitas / kapabilitas Pengelola Keuangan segera dilakukan baik berupa sosialisasi maupun bimtek keuangan

ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2023.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu atau berorientasi pada hasil.

ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Persentase efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 100\% - &= \frac{1,577,167,659}{1,592,899,227} \times 100\% \\ &= 100\% - 99.01\% \\ &= 0.99\% \end{aligned}$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di indikator II ini sebesar 0.99% secara teori efisiensi.

Indikator 3

Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah

HAMBATAN / TANTANGAN

1. Kondisi fasilitas pendukung layanan public khususnya di area layanan front office kondisinya sangat memprihatinkan/ kondisi atap gedung yg rubuh
2. Masih rendahnya komitmen pelayanan petugas layanan front office yang melayani langsung masyarakat.

SOLUSI

Upaya Peningkatan kualitas sarana dan prasarana segera dilaksanakan melalui usulan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor pada rencana anggaran tahun depan

ANALISA PENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2022.
2. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu atau berorientasi pada hasil.

ANALISA EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

$$\text{Persentase efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 100\% - &= \frac{780,006,105}{791,338,800} \times 100\% \\ &= 100\% - 98,56\% \\ &= 1,44\% \end{aligned}$$

Dari gambaran diatas diperoleh realisasi anggaran di indikator III ini sebesar 1,44% secara teori sangat efisien.

Tabel 3.6
Program/Kegiatan yang mendukung **Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder(IKM)**
tahun 2023

| NO | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | REALISASI | | | SISA |
|----------|--|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | | | K | Rp. | K | Rp. | % Rp. | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Predikat SAKIP perangkat daerah; opini PKPD; IKM | 1396 | 2,418,250,727 | 1389 | 2,391,186,264 | 98.88 | 27,064,463 |
| A | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dok. Perencanaan perangkat daerah yg disusun sesuai standar dan tepat wkt | 4 | 16,230,700 | 4 | 16,230,500 | 100.00 | 200 |
| | Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah | Jmh Dok. RKA perangkat daerah yg tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 2 | 13,010,700 | 2 | 13,010,500 | 100.00 | 200 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dok. Kinerja yg dihasilkan | 1 | 1,470,000 | 1 | 1,470,000 | 100.00 | - |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jmh rekomendasi hasil monitoring evaluasi kinerja yg tersusun sesuai standar prosedur | 1 | 1,750,000 | 1 | 1,750,000 | 100.00 | - |
| B | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase PNS perangkat daerah yg berkinerja baik | 100 | 1,592,899,227 | 100 | 1,577,167,659 | 99,01 | 15,731,568 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah PNS | 25 | 1,590,659,227 | 100 | 1,574,927,659 | 99,01 | 15,731,568 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jmh Dok. LK akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu | 1 | 2,240,000 | 1 | 2,240,000 | 100.00 | |
| C | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase penyampaian lap. Aset sesuai standar dan tepat wkt | 1 | 1,015,000 | 1 | 1,015,000 | 100.00 | - |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan Aset yang disusun | 1 | 1,015,000 | 1 | 1,015,000 | 100.00 | - |
| D | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi PD yg tersedia pada PD | 204 | 396,203,500 | 201 | 396,016,100 | 99.95 | 187,400 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | Jmh Kom. Instalasi listrik penerangan yg tersedia | 7 | 2,118,700 | 7 | 2,118,700 | 100 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jmlh peralatan dan perlengkapan kantor yg terpelihara | 37 | 155,068,800 | 36 | 154,992,500 | 99.95 | 76,300 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|-----------|
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jmlh makan minum yg tersedia | 2 | 32,696,000 | 2 | 32,620,000 | 99.77 | 76,000 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jmh jenis cetak dan penggandaan yg tersedia | 3 | 19,342,600 | 3 | 19,342,600 | 100.00 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jmh jenis bahan bacaan dan perundang-undangan yg tersedia | 36 | 1,440,000 | 36 | 1,440,000 | 100.00 | - |
| | | | | | | | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jmh lap. Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 81 | 185,537,400 | 79 | 185,502,300 | 100.00 | 35.100 |
| E | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase tertib ketatausahaan kantor | 1073 | 242,455,550 | 1073 | 233,428,205 | 96,28 | 9,027,345 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jmh surat masuk dan keluar yg dikelola | 1000 | 937,000 | 1000 | 937,500 | 99.95 | 500 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Jmh jenis kebutuhan komunikasi,air, listrik yg terpenuhi | 6 | 32,998,050 | 6 | 32,476,205 | 98.42 | 521.845 |
| | Penyediaan Jasa Peralatan & perlengkapan ktr | Jmh jenis perlengkapan gdg ktr yg tersedia | 15 | 17,120,000 | 15 | 17,115,000 | 99.97 | 5,000 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jmh tenaga PTT yg di upah | 52 | 191,400,000 | 52 | 182,900,000 | 95.56 | 8,500,000 |
| F | Pemeliharaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase tertib ketatausahaan kantor | 14 | 151,664,750 | 14 | 149,546,800 | 98.60 | 2,117,950 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Randis Jabatan | jmh unit randis yg terpelihara; jmh unit kend yg dilengkapi srt izin | 12 | 105,332,750 | 12 | 103,214,800 | 97.99 | 2,117,950 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah unit gdg ktr yg terpelihara | 2 | 46,332,000 | 2 | 46,332,000 | 100.00 | - |

Tabel 3.9

**Program/Kegiatan yang mendukung Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik
perangkat daerah**

| NO | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | REALISASI | | % Rp. | SISA |
|----------|--|---|-------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|-----------|
| | | | K | Rp. | K | Rp. | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Predikat SAKIP perangkat daerah; opini PKPD; IKM | | | | | | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan Aset yang disusun | 1 | 1,015,000 | 1 | 1,015,000 | 100.00 | - |
| B | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi PD yg tersedia pada PD | 204 | 396,203,500 | 201 | 396,016,100 | 99.95 | 187,400 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | Jmlh Kom. Instalasi listrik penerangan yg tersedia | 7 | 2,118,700 | 7 | 2,118,700 | 99.83 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jmlh peralatan dan perlengkapan kantor yg terpelihara | 37 | 155,068,800 | 36 | 154,992,500 | 99.95 | 76,300 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jmlh makan minum yg tersedia | 2 | 32,696,000 | 2 | 32,620,000 | 99.77 | 76,000 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jmh jenis cetak dan penggandaan yg tersedia | 3 | 19,342,600 | 3 | 19,342,600 | 100.00 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jmh jenis bahan bacaan dan perundang-undangan yg tersedia | 36 | 1,440,000 | 36 | 1,440,000 | 100.00 | - |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jmh lap. Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 81 | 185,537,400 | 79 | 185,502,300 | 100.00 | 35.100 |
| C | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase tertib ketatausahaan kantor | 1073 | 242,455,550 | 1073 | 233,428,205 | 96,28 | 9,027,345 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jmh surat masuk dan keluar yg dikelola | 1000 | 937,000 | 1000 | 937,500 | 99.95 | 500 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Jmh jenis kebutuhan komunikasi,air, listrik yg terpenuhi | 6 | 32,998,050 | 6 | 32,476,205 | 98.42 | 521.845 |
| | Penyediaan Jasa Peralatan & perlengkapan ktr | Jmh jenis perlengkapan gdg ktr yg tersedia | 15 | 17,120,000 | 15 | 17,115,000 | 99,97 | 5,000 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|--|-----------|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------------|
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jmh tenaga PTT yg di upah | 52 | 191,400,000 | 52 | 182,900,000 | 95.56 | 8,500,000 |
| D | Pemeliharaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase tertib ketatausahaan kantor | 14 | 151,664,750 | 14 | 149,546,800 | 98.60 | 2,117,950 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Randis Jabatan | jmh unit randis yg terpelihara; jmh unit kend yg dilengkapi srt izin | 12 | 105,332,750 | 12 | 103,214,800 | 97.99 | 2,117,950 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah unit gdg ktr yg terpelihara | 2 | 46,332,000 | 2 | 46,332,000 | 100.00 | - |
| JUMLAH | | | | 791,338,800 | | 780,006,105 | 98.56 | 11,332,695 |

Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar dari tahun ke tahun berupaya meningkatkan kapasitas SDM demi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat salah satu upaya nyata adalah dengan mengupayakan ketersediaan website OPD sehingga masyarakat umum dapat meng-akses layanan apa saja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial selama ini. Upaya nyata tersebut dapat kita lihat diantaranya;

- Meningkatkan kualitas tata kelola kantor khususnya ketausahaan persuratan, penggandaan penyediaan kelengkapan kantor serta sarana pendukung lainnya;
- Meningkatkan kualitas pelayanan public yg berkaitan langsung dengan penyediaan layanan kepada masyarakat / memberikan kemudahan akses serta penyediaan layanan dukungan kepada masyarakat saat berkunjung mengurus administrasi layanan sosial di Dinas Sosial seperti penyediaan ruangan merokok, taman bermain anak serta ruangan laktasi bagi ibu menyusui;
- Mengupayakan Rehabilitasi / Perbaikan sarana kantor yang sudah mulai termakan usia seperti perbaikan plafon, Atap yang bocor serta perbaikan sarana pendingin udara yang sudah tidak berfungsi maksimal serta mengupayakan pengadaan sarana olah data yang mumpuni sehingga Dinas Sosial mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik;
- Meningkatkan Kompetensi ASN yang tidak berlatar belakang pendidikan Ilmu Sosial dengan mengusulkan yang bersangkutan untuk ikut Diklat Pelayanan Pekerja Sosial yang secara rutin dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Latihan BPKKS Makassar sehingga ASN yang bersangkutan dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensinya di Bidang Sosial.

Pelaksanaan Pengukuran Kepuasan Masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar di tahun 2023 dilaksanakan secara mandiri dengan menempatkan kotak partisipasi di beberapa ruangan diantaranya adalah pada Ruang lobi Kantor serta ruang

Pelayanan Penginputan Basis Data Terpadu dimana masing-masing kotak partisipasi terinci sebagai berikut;

1. Di Ruang Lobi terdapat 65 kartu partisipasi (54 Responden) yang menyatakan bahwa layanan dilaksanakan dengan sangat baik **96,77 (Sangat baik)**;
2. Pada Pelayanan Basis Data Terpadu Data Kesejahteraan Sosial terdapat 120 Kartu partisipasi dengan tingkat kepuasan layanan mencapai **90,32 (Sangat baik)**.



Serbaneka Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat lingkup Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar



01/05/23

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran tahun 2023

| NO | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | REALISASI | | % Rp. | SISA |
|----------|--|---|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | | | K | Rp. | K | Rp. | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Predikat SAKIP perangkat daerah; opini PKPD; IKM | 1396 | 2,418,250,727 | 1389 | 2,391,186,264 | 98.88 | 27,064,463 |
| a | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dok. Perencanaan perangkat daerah yg disusun sesuai standar dan tepat wkt | 4 | 16,230,700 | 4 | 16,230,500 | 100.00 | 200 |
| | Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah | Jmh Dok. RKA perangkat daerah yg tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 2 | 13,010,700 | 2 | 13,010,500 | 100.00 | 200 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dok. Kinerja yg dihasilkan | 1 | 1,470,000 | 1 | 1,470,000 | 100.00 | - |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jmh rekomendasi hasil monitoring evaluasi kinerja yg tersusun sesuai standar prosedur | 1 | 1,750,000 | 1 | 1,750,000 | 100.00 | - |
| b | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase PNS perangkat daerah yg berkinerja baik | 100 | 1,592,899,227 | 100 | 1,577,167,659 | 99,01 | 15,731,568 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah PNS | 25 | 1,590,659,227 | 100 | 1,574,927,659 | 99,01 | 15,731,568 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jmh Dok. LK akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu | 1 | 2,240,000 | 1 | 2,240,000 | 100.00 | |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase penyampaian lap. Aset sesuai standar dan tepat wkt | 1 | 1,592,899,227 | 100 | 1,577,167,659 | 99,01 | 15,731,568 |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan Aset yang disusun | 1 | 1,015,000 | 1 | 1,015,000 | 100.00 | - |
| c | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase administrasi PD yg tersedia pada PD | 204 | 396,203,500 | 201 | 396,016,100 | 99.95 | 187,400 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor | Jmh Kom. Instalasi listrik penerangan yg tersedia | 7 | 2,118,700 | 7 | 2,118,700 | 100 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jmlh peralatan dan perlengkapan kantor yg terpelihara | 37 | 155,068,800 | 36 | 154,992,500 | 99.95 | 76,300 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jmlh makan minum yg tersedia | 2 | 32,696,000 | 2 | 32,620,000 | 99.77 | 76,000 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|-----------|
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jmh jenis cetak dan penggandaan yg tersedia | 3 | 19,342,600 | 3 | 19,342,600 | 100.00 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jmh jenis bahan bacaan dan perundang-undangan yg tersedia | 36 | 1,440,000 | 36 | 1,440,000 | 100.00 | - |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jmh lap. Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 81 | 185,537,400 | 79 | 185,502,300 | 100.00 | 35.100 |
| D | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase tertib ketatausahaan kantor | 1073 | 242,455,550 | 1073 | 233,428,205 | 96,28 | 9,027,345 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jmh surat masuk dan keluar yg dikelola | 1000 | 937,000 | 1000 | 937,500 | 99.95 | 500 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik | Jmh jenis kebutuhan komunikasi,air, listrik yg terpenuhi | 6 | 32,998,050 | 6 | 32,476,205 | 98.42 | 521.845 |
| | Penyediaan Jasa Peralatan & perlengkapan ktr | Jmh jenis perlengkapan gdg ktr yg tersedia | 15 | 17,120,000 | 15 | 17,115,000 | 99.97 | 5,000 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jmh tenaga PTT yg di upah | 52 | 191,400,000 | 52 | 182,900,000 | 95.56 | 8,500,000 |
| E | Pemeliharaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase tertib ketatausahaan kantor | 14 | 151,664,750 | 14 | 149,546,800 | 98.60 | 2,117,950 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Randis Jabatan | jmh unit randis yg terpelihara; jmh unit kend yg dilengkapi srt izin | 12 | 105,332,750 | 12 | 103,214,800 | 97.99 | 2,117,950 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah unit gdg ktr yg terpelihara | 2 | 46,332,000 | 2 | 46,332,000 | 100.00 | - |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase Masyarakat Miskin Potensial yg Diberdayakan | 694 | 725,343,600 | 84 | 725,343,600 | 100 | |
| A | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | jmh KK KAT yg mendapat fasilitas pemberdayaan sosial | | 710,298,000 | 84 | 710,298,000 | 100 | |
| | Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT | Jmlh KK KAT yg mendptkn fasilitas dayasos | 84 | 710,298,000 | 84 | 710,298,000 | 100 | |
| B | Pengembangan Potensi Sumber Kesos Daerah Kab/Kota | jumlah Masy. miskin potensial yg diberdayakan | | 15,045,600 | 110 | 15,045,600 | 100 | |
| | Peningkatan kemampuan potensi sumber kesos klg kewenangan kab/kota | Jlhm PSKS yg diberi ktrmpln | | 15,045,600 | 110 | 15,045,600 | 100 | |
| 3 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMKS yg ditangani dlm pelayanan rehsos | 45 | 53,460,800 | 45 | 53,460,200 | 97.97 | 600 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--------------|----------------------|-------|----------------------|--------------|-------------------|
| A | Rehsos dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng di luar panti sosial | Jmlh PMKS luar panti yg ditangani dlm pelayanan sosial | | | | | | |
| | Penyediaan Permakanan | Jumlah PMKS luar panti yg mendptkn peny. Permakanan | | | | | | |
| B | Rehsos dasar penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial | Jmlh PMKS yg dilayani | | 53,460,800 | 45 | 53,460,200 | 97.97 | 600 |
| | Pemberian Bimsos kepada kpd kel. penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial | Jumlah ODGJ/WRSE/terlantar yg ditangani | 15 | 53,460,800 | 45 | 53,460,200 | 97.97 | 600 |
| 4 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase masyarakat miskin penerima penjaminan sosial | 87814 | 6,239,532,800 | 70520 | 6,212,145,900 | 99,56 | 27,386,900 |
| A | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jmh Data KK dgn tk kesos valid | | 607,519,000 | 70520 | 580,626,500 | 95,57 | 26,892,500 |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jmlh data KM yg diverifikasi;jmlh KM penerima banpangan yg diverifikasi;jmlh KPM PKH yg diverifikasi;Jmlh RTLH yg direhab | | 607,519,000 | 70520 | 580,626,500 | 95,57 | 26,892,500 |
| 5 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase korban bencana yg ditangani | 150 | 339,197,050 | 150 | 339,071,905 | 99.96 | 125,145 |
| A | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Jmlh paket banlog yg disediakan | | 339,197,050 | 150 | 339,071,905 | 99.96 | 125,145 |
| | Penyediaan Makanan | Jmlh paket bansos yg disalurkan | | 339,197,050 | 150 | 339,071,905 | 99.96 | 125,145 |
| 6 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase lembaga sosial pemberi layanan usaha kesos | 2 | 36,334,100 | 2 | 36,334,100 | 100 | - |
| A | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota | Jmh TMP yg dikelola | | 36,334,100 | 2 | 36,334,100 | 100 | - |
| | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota | Jmh TMP yg dikelola | 2 | 36,334,100 | 2 | 36,334,100 | 100 | - |
| JUMLAH | | | | 9,812,119,077 | | 9,757,541,969 | 99,44 | 54,577,108 |

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tahun 2023 merupakan tahun yang memberikan tantangan tersendiri bagi Dinas Sosial dalam pencapaian target kinerja tahunan, maupun pencapaian target kinerja 5 tahunan. Keterbatasan anggaran menjadi persoalan klasik dan lagi lagi berulang, hal ini tak mampu dihindari mengingat Pelaksanaan Program/ Kegiatan apapun itu tentu akan mampu diukur keberhasilannya jika ditopang ketersediaan anggaran yg memadai. Dinas Sosial sebagai peng-ampu urusan Sosial dibebani target capaian SPM yang mampu setidaknya memberikan Pelayanan dan Penanganan Maksimal kepada Kelompok Rentan Lanjut Usia, Anak Luar Panti, Disabilitas serta Masyarakat Korban Bencana Alam Maupun Sosial dinilai belum berada di tingkat yang seharusnya. Isu strategis seperti capaian SPM, Penanganan Stunting serta Percepatan Pengurangan Angka Kemiskinan Ekstrem hingga tahu ke-5 pelaksanaan RPJMD belum juga mampu memberikan dampak secara signifikan. Dan harapannya semoga di tahun yg akan datang Prioritas Anggaran lebih berpihak kepada isu-isu strategis yg dimaksud.

B. Langkah Perbaikan kedepan

Berdasarkan pada pencapaian diatas, masalah prioritas yang memerlukan tindak lanjut segera adalah;

1. Pencapaian Target SPM belum maksimal

Rencana Tindak Lanjut :

Dukungan anggaran yg memadai diharapkan mampu mendukung percepatan pencapaian target SPM, khususnya pada penanganan Disabilitas Terlantar, penyediaan sarana alat bantu sangat-sangat diperlukan hal ini diupayakan dapat terakomodir melalui dana pusat APBN maupun dana dekonsentrasi provinsi serta melalui peran serta pihak swasta seperti program Corporate Social Responsibility (CSR).

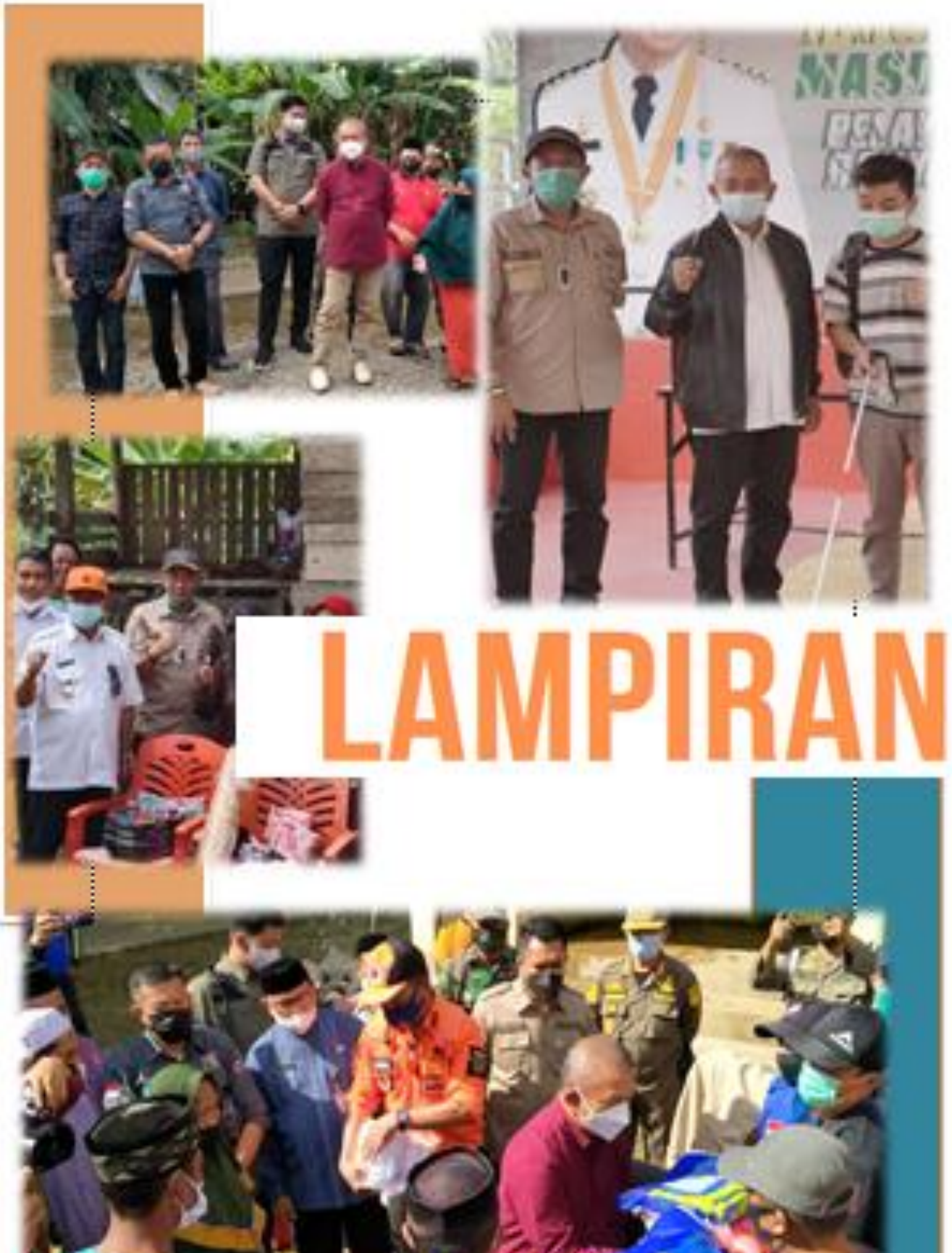
2. Masih rendahnya capaian di Program Pemberdayaan Sosial

Sama hal nya denga tahun sebelumnya (tahun 2022) tingkat capaian di Program ini sangat rendah akibat sangat terbatasnya Pagu yg dialokasikan untuk Program ini. Hal ini tidak terlepas dari catatan bahwa Program tersebut bukan menjadi Prioritas utama

mengingat program ini tidak menjadi capaian dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditambah lagi belum sinkronnya data kemiskinan yang menjadi sasaran prioritas yang akan ditetapkan menjadi Calon Penerima Bantuan yang sifatnya berupa Bantuan Sosial maupun Bantuan yang sifatnya Stimulan.

Rencana Tindak Lanjut :

Penetapan Data Kemiskinan / Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berada ditingkat Desa / Kelurahan yang kemudian ditetapkan sebagai prioritas penerima bantuan sosial





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS SOSIAL

Jl. H. Andi Depu Nomor 147 Polewali, Kode Pos 91313
Telepon. 0428-21025 Faks. 0428-22948

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. AZWAR JASIN, S.Sos., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM MASDAR**
Jabatan : Bupati Polewali Mandar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran kinerja ini, Setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua,
BUPATI POLEWALI MANDAR,

H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS SOSIAL,

H. AZWAR JASIN, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19730711 199203 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA DINAS SOSIAL**

| NO | Sasaran Kinerja | Indikator Kinerja | Capaian 2022 | Target 2023 |
|----|--|--|--------------|-------------|
| 1 | Meningkatnya ketahanan sosial | Indeks Sosial | 43,67% | 49,27% |
| 2 | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Sangat Baik | Sangat Baik |
| 3 | Meningkatnya ketahanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial | Persentase PMKS yang memiliki ketahanan sosial | 37.00% | 38.00% |
| 4 | Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial | Persentase masyarakat miskin potensial yang memiliki ketahanan sosial | 13,00% | 21.00% |
| 5 | Meningkatnya ketahanan sosial PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana | Persentase PMKS non potensial dan masyarakat korban bencana yang memiliki ketahanan sosial | 81,00% | 82.00% |
| 6 | Meningkatnya peran aktif lembaga sosial dalam layanan kesejahteraan sosial | Persentase lembaga sosial yang aktif dalam pemberian layanan kesejahteraan sosial | 100% | 100% |
| 7 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah | Predikat SAKIP perangkat daerah | A | A |
| | | Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah | 100.00% | 100.00% |
| | | Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah | Sangat Baik | Sangat Baik |

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

| No | Program | Anggaran | keterangan |
|---------------|---|----------------------|------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2,704,833,715 | APBD |
| 2 | Program Pemberdayaan Sosial | 732,230,900 | APBD |
| 3 | Program Rehabilitasi Sosial | 216,740,900 | APBD |
| 4 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 182,754,600 | APBD |
| 5 | Program Penanganan Bencana | 95,906,250 | APBD |
| 6 | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 31,549,500 | APBD |
| JUMLAH | | 3,964,015,865 | |


Polewali, 10 April 2023

Pihak Kedua
BUPATI POLEWALI MANDAR



H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama
Kepala Dinas Sosial



H. AZWAR JASIN, S.Sos, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19730711 199203 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

| Urusan Pemerintahan : 1.06 SOSIAL SKPD : 1-06.0-00.0-00.15 DINAS SOSIAL Unit Organisasi : 1-06.0-00.0-00.15.000 DINAS SOSIAL Sub. Unit Organisasi : 1-06.0-00.0-00.15.000.000 DINAS SOSIAL | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| NO. | URAIAN | ANGGARAN 2023 | REALISASI 2023 | (%) | REALISASI 2022 |
| 5 | BELANJA | 9,812,119,077.00 | 9,757,541,969.00 | 99.44 | 3,629,331,651.00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 9,689,773,077.00 | 9,635,235,969.00 | 99.44 | 3,600,268,651.00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 1,590,659,227.00 | 1,574,927,659.00 | 99.01 | 2,105,452,573.00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 7,395,143,850.00 | 7,356,338,310.00 | 99.48 | 1,444,816,078.00 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 703,970,000.00 | 703,970,000.00 | 100.00 | 3,559,326,100.00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 122,346,000.00 | 122,306,000.00 | 0.00 | 29,063,000.00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 122,346,000.00 | 122,306,000.00 | 99.97 | 29,063,000.00 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | | (9,812,119,077.00) | (9,757,541,969.00) | 99.44 | (3,629,331,651.00) |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SLPA) | | (9,812,119,077.00) | (9,757,541,969.00) | 99.44 | (3,629,331,651.00) |

Polewali, 31 Desember 2023
KEPALA DINAS SOSIAL

H. AZWAR JASIN, S.Sos, M.Si
NIP : 19730711 199203 1 001